



Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi Masyarakat: Studi Kasus Desa Teteaji Kabupaten Sidenreng Rappang

Nur Annisa¹, Erfina², Muhammad Nur³

^{1,2,3}Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, Indonesia

Email: ¹nurannisaa0429@gmail.com, ²erfinafisip.05@gmail.com, ³muhammadnur@ppsumsraprang.ac.id

Abstrak

Permasalahan sampah di wilayah pedesaan menjadi tantangan serius akibat meningkatnya volume sampah dan keterbatasan sistem pengelolaan. Peningkatan jumlah penduduk selalu diikuti dengan peningkatan volume sampah, sehingga menuntut adanya perubahan dalam pengelolaan sampah terutama dari paradigma lama (kumpulkan, angkut, buang) menuju paradigma baru dengan konsep 3R (reduce, reuse, recycle). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat di Desa Teteaji, Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini dilandaskan pada teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle yaitu Content of Policy (isi kebijakan) dan context of implementation (konteks implementasi) dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak Nvivo 12 Plus untuk proses coding, thematic analysis, dan visualisasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dalam pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat belum berjalan secara optimal yang ditandai dengan belum adanya peraturan desa sebagai landasan operasional, keterbatasan sarana dan prasarana, serta lemahnya koordinasi antaraktor serta partisipasi masyarakat masih bersifat insidental dan belum terorganisir secara sistematis. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh interaksi antara isi kebijakan dan konteks implementasi sehingga diperlukan penguatan regulasi, sarana dan prasarana, serta sistem pengelolaan yang terintegritas guna mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah, Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Berkelanjutan.

Abstract

The waste problem in rural areas is a serious challenge due to the increasing volume of waste and the limitations of the management system. Population growth is always followed by an increase in waste volume, thus demanding changes in waste management, especially from the old paradigm (collect, transport, dispose) to the new paradigm with the 3R concept (reduce, reuse, recycle). This study aims to analyze the implementation of community participation-based waste management policies in Teteaji Village, Sidenreng Rappang Regency. This study is based on Merilee S. Grindle's policy implementation theory, namely Content of Policy and Context of Implementation, using a qualitative approach with data collected through interviews, observation, and documentation. Data analysis was carried out using Nvivo 12 Plus software for coding, thematic analysis, and data visualization. The results of the study indicate that the implementation of policies in waste management has not been running optimally, characterized by the absence of village regulations as an operational basis, limited facilities and infrastructure, and weak coordination between actors. Community participation is quite good, but is still incidental and not systematically organized. Therefore, the success of policy implementation is influenced by the interaction between the policy content and the implementation context, so that strengthening of regulations, facilities and infrastructure, and an integrated management system is required to realize sustainable waste management.

Keywords: *Policy Implementation, Waste Management, Community Participation, Sustainable Development.*

PENDAHULUAN

Permasalahan sampah merupakan isu lingkungan yang semakin kompleks dan menjadi tantangan serius dalam pembangunan berkelanjutan, baik di tingkat global maupun nasional. Di berbagai negara berkembang, peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi berkontribusi terhadap meningkatnya timbulan sampah yang tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan yang memadai. Kondisi ini menyebabkan berbagai permasalahan lingkungan, seperti polusi tanah, udara, dan udara, serta berdampak pada kesehatan masyarakat. Di Indonesia, permasalahan pengelolaan sampah masih didominasi oleh pendekatan konvensional yang berorientasi pada pola “kumpul-angkut-buang”, sehingga belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas permasalahan yang ada. Seiring dengan berkembangnya paradigma pengelolaan lingkungan, pendekatan modern dalam pengelolaan sampah mulai mengedepankan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) serta pengelolaan berbasis partisipasi. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam mengurangi timbulnya sampah dari sumbernya, sekaligus mendorong terciptanya sistem pengelolaan yang lebih berkelanjutan. Namun demikian, penerapan pendekatan ini di tingkat lokal, khususnya di wilayah pedesaan, masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek kelembagaan, sumber daya, maupun perilaku masyarakat sehingga belum mampu menjawab kompleksitas permasalahan secara berkelanjutan.

Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam mengatur dan mengelola sampah secara terpadu dan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang menegaskan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan melalui kegiatan pengurangan dan penanganan sampah, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat yang juga didukung oleh Peraturan daerah (Perda) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah. Pentingnya keterlibatan semua pihak dalam setiap tahapan pengelolaan sampah mulai dari pengurangan hingga pemrosesan akhir. Namun, pada tataran implementasi, masih banyak desa yang menghadapi kendala dalam menerapkan konsep partisipatif secara efektif. Tantangan tersebut mencakup rendahnya kesadaran warga, keterbatasan sarana dan prasarana, serta lemahnya strategi komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah desa dengan masyarakat.

Selain aspek pengelolaan struktural, sampah juga tidak dapat lepas dari perspektif sosial dan humaniora, khususnya yang berkaitan dengan nilai-nilai lokal dan budaya masyarakat. Di wilayah pedesaan, praktik pengelolaan sampah seringkali dipengaruhi oleh kebiasaan dan konstruksi sosial masyarakat, seperti membakar sampah atau membuangnya di lahan kosong yang dianggap sebagai solusi praktis. Praktik tersebut tidak hanya mencerminkan keterbatasan fasilitas, tetapi juga menunjukkan cara masyarakat memaknai kebersihan dan pengelolaan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, nilai gotong royong yang masih kuat sebenarnya merupakan potensi sosial yang dapat mendukung pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat, meskipun belum dioptimalkan secara sistematis dalam kerangka kebijakan yang terstruktur.

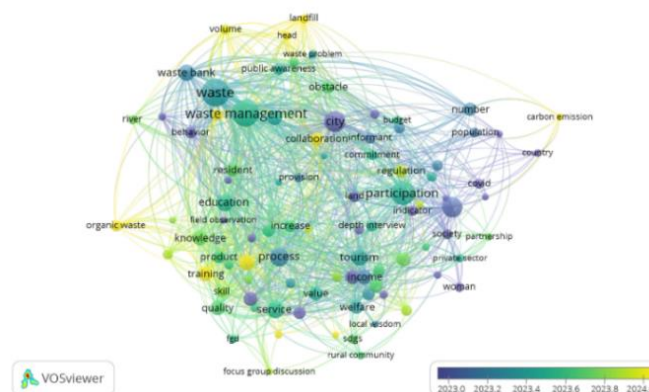
Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), timbulan sampah di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 34,09 juta ton, namun hanya sekitar 32,58% atau 11,10 juta ton yang berhasil dikelola secara layak. Di Kabupaten Sidenreng Rappang total timbulan sampah mencapai 165,37 ton per hari dan hanya sekitar 0,71% yang berhasil dikelola dengan baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan sampah tidak hanya terbatas pada aspek teknis pengumpulan dan pembuangan, tetapi juga menyangkut persoalan kelembagaan, partisipasi masyarakat, serta komitmen pemerintah daerah hingga tingkat desa dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri (Erlinnawati & Purwanto, 2024). Untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan, kita perlu lebih memperkuat peran aktif berbagai sektor seperti pemerintah, sektor swasta, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat. Pembangunan berkelanjutan harus berpedoman pada tiga pilar utama: ekonomi, sosial dan lingkungan hidup, dan didasarkan pada keadilan, keragaman, hubungan manusia-alam dan fokus jangka panjang (Arif et al., 2024).

Pada wilayah pedesaan, kompleksitas masalah semakin meningkat akibat belum tersedianya sistem pengumpulan yang terintegrasi, rendahnya kesadaran masyarakat, serta ketergantungan pada metode tradisional seperti pembuangan sembarangan atau pembakaran terbuka yang berdampak negatif terhadap kesehatan. Kegiatan pembakaran sampah yang tidak sesuai prosedur dapat menimbulkan permasalahan seperti pencemaran udara (Zakirman et al., 2022). Pemerintah desa sebenarnya telah berupaya menjaga

kebersihan melalui kegiatan rutin “Jumat Bersih”, namun rendahnya kesadaran masyarakat menyebabkan lokasi yang sudah dibersihkan kembali dipenuhi sampah beberapa hari kemudian. Hal ini menunjukkan bahwa program kebersihan yang bersifat seremonial belum mampu menumbuhkan perilaku pengelolaan sampah yang berkelanjutan di masyarakat. Siklus tersebut menunjukkan bahwa perubahan perilaku masyarakat terhadap pengelolaan sampah belum terinternalisasi secara mendalam, sehingga kegiatan kebersihan masih bersifat simbolis dan belum berkelanjutan. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan dan implementasi yang dijalankan di lapangan. Kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaan lapangan menunjukkan pentingnya menganalisis implementasi kebijakan secara kontekstual menggunakan teori Merilee S. Grindle, yang menyoroti hubungan antara isi kebijakan dan konteks implementasi.

Desa Teteaji di Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu wilayah yang mencerminkan kondisi tersebut. Pengelolaan sampah di desa ini masih bersifat konvensional dan belum didukung oleh sistem yang terstruktur, seperti ketiadaan fasilitas pengelolaan sampah dan regulasi di tingkat desa. Meskipun terdapat upaya pemerintah desa melalui kegiatan kebersihan seperti “Jumat Bersih”, namun kegiatan tersebut belum mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan dan implementasi yang dijalankan di tingkat lokal.

Studi (Maulziandra, 2023) mengungkapkan bahwa Permasalahan sampah tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi menuntut partisipasi masyarakat seluas luasnya untuk turut mencari solusi dalam mengelola sampah dari sumber masalah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat, baik secara ekonomis maupun lingkungan. Penelitian dari (Zukhriadi et al., 2021) menyoroti Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan aspek penting dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Sementara itu, penelitian dari (NURUL LAILI, 2022) mengungkapkan bahwa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan umum tentang pengelolaan sampah yang benar dan memberdayakan masyarakat untuk mengelola sampah dengan metode Reduce, Reuse, dan Recycle sebagai salah satu metode yang tepat dalam pengolahan sampah. Lebih lanjut, penelitian (Rizqianti Hariz & Sulaiman, 2022) mengungkapkan bahwa Pengelolaan sampah berkelanjutan perlu memperhatikan 5 aspek pengelolaan sampah, yaitu aspek teknis operasional, aspek kelembagaan, aspek pembiayaan, aspek hukum dan regulasi, dan aspek peran serta masyarakat. Studi (Khaironi, 2023) mengungkap bahwa masalah sampah timbul akibat kurangnya kapasitas tempat pembuangan akhir dan rendahnya pengetahuan tentang dampak sampah. Penelitian (Lukman et al., 2022) mengungkap bahwa program kebijakan tidak berjalan efektif atau belum tercapai karena kurangnya perhatian dan pengawasan dari lembaga terkait, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, serta tempat pengolahan sampah (TPS dan TPA) yang tidak memadai, sehingga tindakan pembuangan sampah sembarangan semakin marak. Waktu operasional pembuangan sampah sering kali terlambat dan belum sepenuhnya diikuti oleh masyarakat. Selain itu, jumlah bank sampah semakin berkurang, dan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah masih sangat rendah. Oleh karena itu masyarakat mengelola sampahnya dengan cara membakar, menimbun, atau membuangnya ke sungai. Temuan ini mengidentifikasi bahwa integrasi antara kebijakan dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengimplementasikan praktik pengelolaan sampah yang berkelanjutan.



Gambar 1. Overlay Visualitation
Sumber: Hasil Olahan Vosviewer (2025)

Berdasarkan hasil analisis bibliometrik menggunakan VOSviewer, terlihat bahwa penelitian tentang pengelolaan sampah masih terpusat pada konteks perkotaan yang ditandai dengan topik *city* dengan fokus pada isu teknis seperti *waste bank*, *landfill*, dan *recycling behavior*. Sementara itu, topik mengenai *participation*, *local wisdom*, dan *rural community* muncul dengan frekuensi yang masih rendah dalam dua

tahun terakhir. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) dalam memahami bagaimana kebijakan pengelolaan sampah diimplementasikan dalam konteks lokal yang dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya dan karakteristik sosial budaya masyarakat. Penelitian sebelumnya belum mengkaji secara simultan hubungan antara implementasi kebijakan, partisipasi masyarakat, dan nilai sosial budaya lokal dalam konteks pedesaan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat di Desa Teteaji Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini menggunakan perspektif teori implementasi kebijakan dari Grindle untuk mengkaji interaksi antara isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks *implementasi* (*context of implementation*). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian implementasi kebijakan publik berbasis pendekatan sosial-humaniora, serta menjadi referensi praktis bagi pemerintah desa dalam menyusun strategi pengelolaan sampah yang lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk memahami secara mendalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat di Desa Teteaji, Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan dalam mengungkapkan permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi pemerintah, swasta, kemasyarakatan, kepemudaan, perempuan, olah raga, seni, dan budaya, sehingga dapat dijadikan suatu kebijakan untuk dilaksanakan demi kesejahteraan bersama (Gunawan, 2020). Pendekatan ini dipilih karena mampu menangkap dinamika sosial, perilaku, serta konteks lokal yang mempengaruhi kebijakan pelaksanaan. Tujuan utama dalam penelitian pendekatan kualitatif adalah memahami, menggambarkan, mengembangkan, dan menemukan fenomena pusat yang terdapat dalam penelitian tersebut (Wekke, dkk, 2019). Peneliti berperan langsung sebagai instrumen utama yang mengamati, mewawancarai, dan menafsirkan data di lapangan.

Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria: memiliki keterlibatan langsung dalam pengelolaan sampah, memiliki pengetahuan terkait kebijakan atau praktik pengelolaan sampah, bersedia memberikan informasi secara terbuka. Informan dalam penelitian ini terdiri dari aparatur pemerintah desa (kepala desa dan perangkat desa), tokoh masyarakat, serta masyarakat yang terlibat dalam aktivitas pengelolaan sampah. Untuk memperkaya data, digunakan teknik snowball sampling secara terbatas guna menjangkau informan tambahan berdasarkan rekomendasi informan sebelumnya.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk meningkatkan analisis transparansi, penelitian ini menggunakan perangkat lunak NVivo 12 Plus. Proses coding dilakukan dengan pendekatan kombinasi top-down dan bottom-up. Pendekatan top-down mengacu pada teori penerapan kebijakan Merilee S. Grindle, khususnya dimensi isi kebijakan dan konteks implementasi sebagai simpul induk. Selanjutnya pendekatan bottom-up digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema empiris yang muncul dari data lapangan, seperti bentuk partisipasi, masyarakat melakukan pengelolaan sampah, serta faktor sosial budaya. Tema-tema tersebut dikembangkan menjadi node anak dalam hierarki pengkodean, sehingga menghasilkan analisis yang bersifat teoritis sekaligus kontekstual.

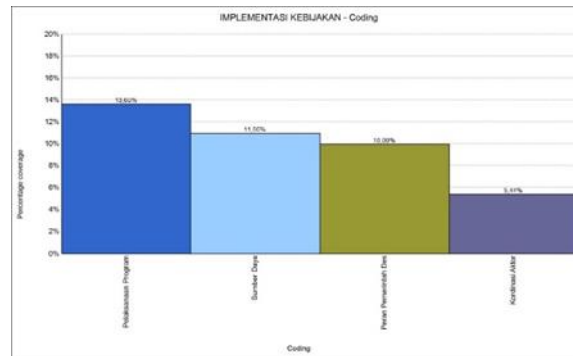
Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi antar informan, triangulasi teknik melalui perbandingan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta triangulasi waktu melalui pengumpulan data pada waktu yang berbeda. Proses interpretasi data dilakukan secara refleksi dengan temuan empiris dan kerangka teori, sehingga menghasilkan kesimpulan yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah

Teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle digunakan untuk menganalisis bagaimana kebijakan pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat dilaksanakan di Desa Teteaji. Pendekatan ini menekankan dua dimensi utama: *content of policy* (isi kebijakan) dan *context of implementation* (konteks implementasi). Untuk memperkuat analisis, data hasil wawancara diolah menggunakan NVivo 12 Plus sehingga menghasilkan distribusi persentase coding sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Hasil Coding Implementasi Kebijakan
Sumber: Hasil Olah Data Nvivo 12 Plus (2026)

Hasil analisis menggunakan NVivo 12 Plus, implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Desa Teteaji menunjukkan variasi pada beberapa aspek utama. Aspek pelaksanaan program memiliki tingkat kemunculan tertinggi sebesar 13,65%. Dominasi aspek pelaksanaan program tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan lebih banyak diwujudkan dalam bentuk aktivitas lapangan dibandingkan dengan penguatan sistem kebijakan. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan pengelolaan sampah di Desa Teteaji belum berjalan secara optimal dan masih berada pada tahap awal. Secara normatif, pengelolaan sampah di Desa Teteaji telah memiliki dasar hukum di tingkat daerah melalui Peraturan Daerah (Perda). Namun, kebijakan tersebut belum diturunkan ke dalam Peraturan Desa (Perdes) sebagai pedoman operasional di tingkat lokal. Kondisi ini tercermin dari pernyataan informan:

“Sampai saat ini sebenarnya desa belum memiliki program pengelolaan sampah yang terstruktur atau regulasi khusus seperti peraturan desa. Namun secara umum tujuan yang ingin dicapai pemerintah desa adalah menjaga kebersihan lingkungan dan meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan.” (Kepala Desa Teteaji)

Meskipun demikian, terdapat upaya awal dari pemerintah desa dalam bentuk layanan sederhana, seperti penjadwalan pengangkutan sampah dua kali seminggu serta rencana pengadaan tempat sampah bagi masyarakat. Namun, program tersebut masih dalam tahap perencanaan dan belum berjalan secara optimal. Hal ini tercermin dari pernyataan informan:

“Desa Teteaji belum memiliki peraturan desa terkait Pengelolaan sampah masyarakat. Cuman, Kalau penanganannya sudah ada sekarang. Sekarang itu masyarakat disuruh simpan sampahnya di depan rumah baru ada mobil yang angkut. Jadi, jadwal Teteaji itu hari Senin dan Jumat.”(Kepala Desa)

Meskipun belum memiliki regulasi formal, pemerintah desa telah melakukan beberapa upaya awal dalam pengelolaan sampah, seperti penjadwalan pengangkutan sampah yang dilakukan dua kali dalam seminggu serta rencana pengadaan tempat sampah bagi masyarakat. Namun demikian, program tersebut belum berjalan secara menyeluruh dan masih menghadapi berbagai keterbatasan, khususnya dari segi sarana dan prasarana.

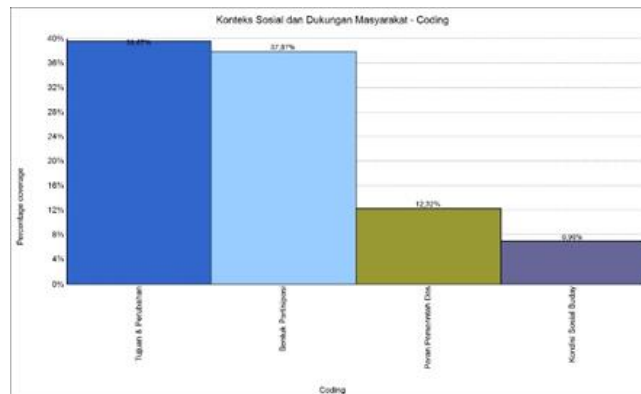
Keterbatasan sumber daya dengan persentase 11,00% ditemukan bahwa ketersediaan sumber daya manusia tidak diimbangi dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Keterbatasan tersebut semakin diperkuat oleh informan:

“Kendala yang dihadapi desa itu tidak adanya tempat pembuangan Akhir (TPA) otomatis masyarakat hanya membuang sampahnya ke daerah jembatan atau sungai terdekat dan adapula masyarakat hanya membakar sampah.”(Sekretaris Desa)

Peran pemerintah desa terlihat cukup dominan dengan persentase 10,00% dalam menginisiasi kegiatan, namun belum diikuti dengan sistem pengelolaan yang terstruktur. Sementara itu, aspek koordinasi antaraktor memiliki tingkat kemunculan paling rendah sebesar 5,44%, yang mengindikasikan bahwa kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak terkait lainnya masih sangat lemah. Pemerintah desa berperan sebagai penggerak utama melalui kegiatan sosialisasi dan ajakan menjaga kebersihan lingkungan. Sementara itu, masyarakat terlibat dalam kegiatan kerja bakti yang dilaksanakan secara berkala, seperti program “Jumat Bersih”. Rendahnya persentase ini mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan belum didukung oleh sistem koordinasi yang kuat, sehingga pelaksanaan program belum berjalan secara maksimal karena tidak adanya sistem pengelolaan yang terorganisir dan berkelanjutan. Hal ini disampaikan langsung oleh informan:

“Koordinasi sebenarnya sudah ada, tapi belum maksimal karena belum ada program khusus pengelolaan sampah yang berjalan secara rutin.” (kepala desa Teteaji)

Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah



Gambar 3. Hasil Coding Konteks Sosial dan Dukungan Masyarakat
Sumber: Hasil Olah Data NVivo 12 Plus (2026)

Pada aspek context of policy, hasil analisis NVivo 12 Plus menunjukkan bahwa tema tujuan dan perubahan memiliki persentase tertinggi sebesar 39,67% yang menunjukkan bahwa terdapat kesadaran yang cukup tinggi dari pemerintah desa dan masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah. Tingginya persentase ini mengindikasikan adanya orientasi terhadap perubahan, terutama dalam menjaga kebersihan lingkungan dan meningkatkan kesadaran masyarakat, diikuti oleh partisipasi masyarakat sebesar 37,87% yang menunjukkan bahwa masyarakat memiliki keterlibatan dalam kegiatan pengelolaan sampah, terutama dalam bentuk kerja bakti dan kegiatan kebersihan lingkungan. Tingginya persentase ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam implementasi kebijakan, meskipun partisipasi tersebut masih bersifat insidental dan belum terorganisir secara sistematis, peran pemerintah desa sebesar 12,32% menunjukkan bahwa pemerintah desa berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat melalui sosialisasi, komunikasi, dan kegiatan kebersihan. Namun, peran ini masih belum mampu membangun sistem pengelolaan yang berkelanjutan, dan kondisi sosial budaya sebesar 6,96% menunjukkan bahwa faktor kebiasaan dan budaya masyarakat turut memengaruhi pengelolaan sampah. Meskipun persentasenya relatif rendah, temuan ini menunjukkan bahwa praktik membakar sampah dan membuang sampah sembarangan masih menjadi kebiasaan yang sulit diubah. Berdasarkan hasil wawancara, partisipasi masyarakat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Salah satu bentuk utama adalah keterlibatan dalam kegiatan kerja bakti seperti diungkapkan langsung oleh informan:

“Pernah ikut kerja bakti terutama kalau ada pengumuman dari desa atau tokoh masyarakat. Biasanya itu dilakukan saat Jumat Bersih atau jika ada kegiatan tertentu.”(Masyarakat)

Selain itu, masyarakat juga melakukan pengelolaan sampah secara mandiri dengan cara yang masih konvensional:

“Sampah rumah tangga biasanya disatukan lalu dibuang kalau bisa dibakar kita bakar di halaman kosong.”(Masyarakat)

Partisipasi dalam bentuk inovasi pengelolaan masih terbatas:

“Untuk pengelolaan sampah seperti bank sampah belum ada, tapi ada beberapa warga yang mulai memilah sampah sendiri terutama sampah plastik untuk dijual.”

Masyarakat juga mengakui bahwa sosialisasi dari pemerintah desa sudah ada, namun belum dilakukan secara intensif dan berkelanjutan. Selain itu, keterbatasan fasilitas menjadi kendala utama dalam mendukung partisipasi masyarakat. Hal ini diungkapkan langsung oleh informan:

“Kendalanya karena belum ada fasilitas... masyarakat kadang bingung mau buang sampah ke mana.”

Namun demikian, partisipasi masyarakat masih menghadapi kendala sosial budaya:

“Kendala utamanya masih kebiasaan lama masyarakat, seperti membakar sampah atau membuangnya di lahan kosong. Selain itu, karena belum ada sistem resmi, masyarakat merasa itu cara paling praktis.”(Masyarakat)

Meskipun demikian, terdapat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah:

“Sebagian masyarakat sebenarnya sudah sadar bahwa sampah itu bisa jadi masalah kalau dibiarkan menumpuk. Tapi karena belum ada tempat pembuangan khusus, masyarakat biasanya cari cara praktis saja seperti dibakar atau dibuang ke tempat kosong.” (Masyarakat)

Temuan ini memperkuat hasil NVivo yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat cukup tinggi secara kuantitas, namun belum didukung oleh sistem yang memadai.

Pembahasan

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah

Berdasarkan teori Grindle, implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Desa Teteaji menunjukkan distribusi yang tidak seimbang antara dimensi content of policy dan context of implementation sebagaimana dikemukakan oleh Merilee S. Grindle. Dimensi content of policy yang mencakup tujuan kebijakan, manfaat program, serta bentuk kegiatan relatif lebih dominan, yang tercermin dari tingginya intensitas pada aspek pelaksanaan program. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan lebih banyak diterjemahkan dalam bentuk aktivitas konkret di lapangan, seperti kerja bakti dan penanganan sampah secara langsung oleh masyarakat.

Namun demikian, jika ditinjau dari dimensi context of implementation, khususnya pada aspek kelembagaan dan koordinasi antaraktor, terlihat bahwa intensitasnya jauh lebih rendah. Rendahnya koordinasi menunjukkan bahwa hubungan antara aktor pelaksana, baik pemerintah desa maupun masyarakat, belum terbangun secara sistematis dan terintegrasi. Selain itu, ketiadaan regulasi di tingkat desa, seperti Peraturan Desa (Perdes), mengindikasikan bahwa struktur kelembagaan yang seharusnya menjadi penggerak implementasi kebijakan belum terbentuk secara optimal. Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun kebijakan memiliki tujuan yang jelas, namun tidak didukung oleh lingkungan implementasi yang memadai.

Dalam perspektif Grindle, keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh interaksi antara isi kebijakan dan konteks implementasinya. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa interaksi tersebut belum berjalan secara seimbang. Dominasi aspek pelaksanaan program tanpa didukung oleh penguatan kelembagaan dan koordinasi menyebabkan implementasi kebijakan bersifat parsial dan tidak berkelanjutan. Dengan kata lain, kebijakan lebih berorientasi pada output kegiatan daripada pembentukan sistem yang mampu menjamin keberlanjutan program.

Lebih lanjut, hasil penelitian ini juga mengindikasikan adanya keterbatasan teori Grindle dalam menjelaskan dinamika implementasi kebijakan di tingkat lokal, khususnya dalam konteks pedesaan. Teori ini belum sepenuhnya mengakomodasi pengaruh faktor sosial budaya, seperti kebiasaan masyarakat dalam mengelola sampah dan nilai gotong royong yang berkembang di masyarakat. Dalam konteks Desa Teteaji, faktor-faktor tersebut justru memiliki peran yang signifikan dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih kontekstual dengan mengintegrasikan perspektif sosial-humaniora untuk melengkapi analisis implementasi kebijakan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Desa Teteaji belum memenuhi prinsip keseimbangan antara content of policy dan context of implementation. Kelemahan pada aspek kelembagaan, koordinasi, dan regulasi menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas implementasi kebijakan, meskipun secara substantif kebijakan telah memiliki tujuan dan arah yang jelas.

Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Teteaji memiliki tingkat partisipasi yang cukup baik dalam kegiatan kebersihan lingkungan, meskipun masih bersifat terbatas dan tidak berkelanjutan. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat umumnya mengelola sampah rumah tangga dengan cara dibakar atau dibuang di lahan kosong. Praktik ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah masih dilakukan secara konvensional dan belum mengarah pada prinsip pengelolaan yang berkelanjutan seperti 3R (reduce, reuse, recycle). Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersihan lingkungan dengan praktik nyata dalam pengelolaan sampah. Partisipasi masyarakat di Desa Teteaji masih bersifat mobilisasi dan tradisional. Partisipasi lebih banyak terjadi dalam bentuk kerja bakti yang bersifat insidental dan bergantung pada ajakan pemerintah desa atau tokoh masyarakat.

Partisipasi masyarakat di Desa Teteaji juga menunjukkan karakter yang masih bersifat mobilisasi dan tradisional. Keterlibatan masyarakat cenderung terjadi ketika ada dorongan atau ajakan dari pemerintah desa maupun tokoh masyarakat, khususnya dalam kegiatan kerja bakti yang bersifat insidental. Dengan demikian, partisipasi yang terbentuk belum bersifat mandiri dan berkelanjutan, melainkan masih bergantung pada inisiatif eksternal. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi belum berkembang ke arah partisipasi aktif yang berbasis kesadaran kolektif dan tanggung jawab bersama.

Dari sisi sosialisasi, masyarakat mengakui bahwa pemerintah desa telah memberikan edukasi terkait kebersihan lingkungan, meskipun intensitasnya masih terbatas. Sosialisasi biasanya dilakukan melalui pertemuan warga atau pengumuman di masjid. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat telah terjalin, namun belum dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Zukhriadi et al., 2021) menyoro Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan aspek penting dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Selain itu, partisipasi belum berkembang ke arah yang lebih terorganisir, seperti pembentukan bank sampah atau sistem pengelolaan berbasis masyarakat. Dalam konteks ini, rendahnya kualitas partisipasi bukan disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat, melainkan oleh tidak adanya sistem yang mampu mengorganisir partisipasi tersebut. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Khaironi, 2023) yang mengungkap bahwa masalah sampah timbul akibat kurangnya kapasitas tempat pembuangan akhir dan rendahnya pengetahuan tentang dampak sampah. Oleh karena itu masyarakat mengelola sampahnya dengan cara membakar, menimbun, atau membuang ke sungai.

Aspek tujuan dan perubahan serta bentuk partisipasi masyarakat memiliki tingkat kemunculan yang tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa secara konseptual terdapat kesadaran dan keinginan masyarakat untuk melakukan perubahan dalam pengelolaan sampah. Namun demikian, keinginan tersebut belum didukung oleh kondisi struktural yang memadai, baik dari segi kebijakan, sarana prasarana, maupun sistem pengelolaan. Selain itu, partisipasi masyarakat masih cenderung bergantung pada inisiatif pemerintah desa dan tokoh masyarakat, sehingga belum berkembang menjadi partisipasi yang mandiri dan berkelanjutan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Teteaji memiliki potensi yang cukup besar dalam mendukung implementasi kebijakan pengelolaan sampah, namun belum terkelola secara optimal akibat keterbatasan sistem, kelembagaan, dan dukungan fasilitas yang memadai.

Hasil penelitian menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara dominasi pelaksanaan program, tingkat partisipasi masyarakat, dan lemahnya koordinasi antaraktor dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Desa Teteaji. Temuan pada Gambar 2 memperlihatkan bahwa aspek pelaksanaan program memiliki intensitas tertinggi, sementara aspek koordinasi aktor berada pada posisi terendah. Di sisi lain, Gambar 3 menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat relatif tinggi, yang ditandai dengan keterlibatan aktif dalam kegiatan kebersihan seperti kerja bakti. Keterkaitan ini mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan lebih bertumpu pada mobilisasi aktivitas masyarakat dibandingkan pada penguatan sistem kelembagaan yang terstruktur.

Dominasi pelaksanaan program yang tidak diimbangi dengan koordinasi yang memadai menyebabkan implementasi kebijakan berjalan secara parsial. Kegiatan yang dilakukan masyarakat cenderung bersifat reaktif dan jangka pendek, tanpa adanya perencanaan yang sistematis, pembagian peran yang jelas, serta mekanisme evaluasi yang berkelanjutan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun terdapat energi sosial yang cukup besar dalam bentuk partisipasi masyarakat, namun belum terkelola secara efektif dalam kerangka kebijakan yang terintegrasi. Akibatnya, kegiatan pengelolaan sampah tidak mampu menghasilkan perubahan perilaku yang signifikan dalam jangka panjang.

Lebih lanjut, keterkaitan antar temuan ini juga memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara dimensi sosial dan dimensi struktural dalam implementasi kebijakan. Tingginya partisipasi masyarakat mencerminkan keberadaan modal sosial yang kuat, khususnya dalam bentuk solidaritas dan gotong royong. Namun, lemahnya koordinasi aktor menunjukkan bahwa modal sosial tersebut belum didukung oleh kapasitas kelembagaan yang memadai. Tanpa adanya struktur organisasi yang jelas, regulasi yang mengikat, serta dukungan sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat cenderung tidak terarah dan sulit berkembang menjadi praktik pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Kondisi tersebut memperkuat temuan bahwa implementasi kebijakan di tingkat desa tidak hanya ditentukan oleh keberadaan kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh kemampuan sistem dalam mengelola interaksi antara aktor, sumber daya, dan konteks sosial. Dalam kasus Desa Teteaji, lemahnya koordinasi menyebabkan tidak adanya integrasi antara upaya pemerintah desa dengan inisiatif masyarakat, sehingga masing-masing berjalan secara terpisah. Hal ini berimplikasi pada tidak terbentuknya sistem pengelolaan sampah yang komprehensif, melainkan hanya serangkaian aktivitas sporadis yang bergantung pada momentum tertentu.

Dengan demikian, dinamika implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Desa Teteaji menunjukkan bahwa keberhasilan tidak cukup hanya mengandalkan partisipasi masyarakat, tetapi juga memerlukan penguatan aspek kelembagaan dan koordinasi antaraktor. Integrasi antara dimensi sosial dan struktural menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Tanpa adanya keseimbangan tersebut, implementasi kebijakan akan terus berada dalam kondisi parsial dan tidak mampu mencapai tujuan yang diharapkan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan

Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat di Desa Teteaji didukung oleh beberapa faktor yang berkaitan dengan isi kebijakan (*content of policy*) maupun konteks implementasi (*context of implementation*) sebagaimana dikemukakan oleh Grindle. Dari aspek kepentingan yang dipengaruhi (*interests affected*), terdapat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah sebagai bagian dari upaya menjaga kebersihan lingkungan. Tingginya orientasi terhadap tujuan dan perubahan menunjukkan bahwa masyarakat dan pemerintah desa memiliki kepentingan yang relatif selaras dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Kondisi ini menjadi modal sosial yang penting dalam mendukung implementasi kebijakan.

Aspek tipe manfaat (*type of benefits*), kebijakan pengelolaan sampah memberikan manfaat kolektif yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat, seperti terciptanya lingkungan yang lebih bersih. Meskipun manfaat tersebut belum sepenuhnya optimal, persepsi terhadap manfaat kebijakan menjadi faktor pendorong bagi masyarakat untuk tetap terlibat dalam kegiatan kebersihan.

Dari aspek pelaksana program (*program implementers*), keberadaan pemerintah desa sebagai aktor utama yang secara aktif melakukan sosialisasi dan menggerakkan kegiatan kebersihan menunjukkan adanya peran institusional dalam mendorong implementasi kebijakan. Peran ini diperkuat oleh keterlibatan tokoh masyarakat yang berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah desa dan masyarakat. Dari aspek konteks implementasi, khususnya pada dimensi kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor, pendekatan yang digunakan oleh pemerintah desa cenderung bersifat persuasif melalui komunikasi sosial. Strategi ini mampu mendorong keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kebersihan meskipun belum didukung oleh mekanisme yang formal.

Aspek tingkat kepatuhan dan respons pelaksana kebijakan, masyarakat menunjukkan tingkat partisipasi yang cukup baik dalam kegiatan kolektif seperti kerja bakti. Hal ini mencerminkan adanya respons positif terhadap upaya pemerintah desa, yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, faktor pendukung implementasi kebijakan di Desa Teteaji lebih banyak bersumber dari aspek sosial, berupa kesadaran, kepentingan bersama, dan partisipasi masyarakat, serta adanya peran aktif pemerintah desa dalam menggerakkan masyarakat.

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan



Gambar 5. Diagram Alir
Sumber: Hasil Olahan Penulis (2026)

Di samping faktor pendukung, implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Desa Teteaji juga dihadapkan pada berbagai faktor penghambat yang secara signifikan memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Pertama, dari aspek sumber daya (*resources committed*), keterbatasan sarana dan prasarana menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan. Tidak tersedianya fasilitas pengelolaan sampah yang memadai serta terbatasnya sistem pengangkutan menunjukkan bahwa kebijakan tidak didukung oleh kapasitas teknis yang cukup. Kondisi ini berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Dari aspek letak pengambilan keputusan (*site of decision making*), belum adanya peraturan desa (Perdes) sebagai turunan dari kebijakan daerah menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan pada tingkat makro dan implementasi di tingkat mikro. Ketiadaan regulasi operasional di tingkat desa menyebabkan kebijakan tidak memiliki pedoman yang jelas dalam pelaksanaannya. Spek derajat perubahan yang diinginkan (*extent of change envisioned*), kebijakan pengelolaan sampah menuntut perubahan perilaku masyarakat yang cukup signifikan. Namun, perubahan tersebut belum sepenuhnya tercapai karena masih adanya kebiasaan lama dalam pengelolaan sampah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat perubahan yang diharapkan belum diimbangi dengan kesiapan sosial dan dukungan sistem.

Aspek koordinasi dan karakteristik kelembagaan dalam konteks implementasi, rendahnya tingkat koordinasi antar aktor serta belum terlembaganya sistem pengelolaan sampah menjadi faktor penghambat. Kelembagaan desa belum memiliki kapasitas yang memadai untuk mengelola kebijakan secara terstruktur dan berkelanjutan. Aspek kondisi sosial budaya, masih kuatnya kebiasaan masyarakat dalam mengelola sampah secara konvensional menunjukkan adanya hambatan kultural dalam implementasi kebijakan. Kebiasaan ini sulit diubah dalam waktu singkat, terutama jika tidak didukung oleh sistem dan fasilitas yang memadai.

Aspek strategi aktor, pendekatan yang digunakan oleh pemerintah desa yang lebih bersifat persuasif belum cukup efektif dalam mendorong perubahan perilaku secara menyeluruh. Tanpa adanya dukungan regulasi yang kuat dan sistem pengelolaan yang jelas, strategi tersebut cenderung menghasilkan partisipasi yang bersifat insidental. Dengan demikian, faktor penghambat implementasi kebijakan di Desa Teteaji lebih didominasi oleh aspek struktural dan sistemik, seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya kelembagaan, serta belum adanya integrasi kebijakan antara tingkat daerah dan desa. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Desa Teteaji dipengaruhi oleh interaksi antara faktor pendukung yang bersifat sosial dan faktor penghambat yang bersifat struktural. Ketidakseimbangan antara kedua faktor tersebut menyebabkan kebijakan belum dapat diimplementasikan secara optimal dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat di Desa Teteaji belum terlaksana secara optimal. Ditinjau dari tujuan penelitian, implementasi kebijakan masih berada pada tahap awal dan belum memiliki sistem yang terstruktur. Aspek isi kebijakan belum terpenuhi secara memadai, terutama terkait kejelasan operasional regulasi dan dukungan sumber daya. Sementara itu, pada aspek konteks implementasi, partisipasi masyarakat telah muncul sebagai potensi penting, namun masih bersifat terbatas dan belum terorganisasi secara berkelanjutan. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan penerapan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh keselarasan antara substansi kebijakan dan kondisi sosial yang melingkupinya. Dengan demikian, penelitian ini menemukan bahwa rendahnya tingkat penerapan kebijakan disebabkan oleh keterpaduan antara aspek struktural dan sosial dalam pengelolaan sampah di tingkat desa.

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategi untuk meningkatkan efektivitas penerapan kebijakan pengelolaan sampah. Pemerintah desa disarankan untuk memperkuat aspek ekosistem melalui penyusunan Peraturan Desa sebagai pedoman operasional. Selain itu, peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah perlu menjadi prioritas guna mendukung pelaksanaan kebijakan secara teknis. Upaya penguatan kelembagaan dan koordinasi antaraktor juga penting dilakukan agar partisipasi masyarakat dapat berkembang secara lebih terorganisasi dan berkelanjutan. Di sisi lain, peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat perlu dilakukan secara konsisten untuk mendorong perubahan perilaku menuju pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan model pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat yang lebih inovatif dan kontekstual sesuai dengan karakteristik wilayah pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, M., Sumarmi, S., Mutia, T., & Prasad, R. R. (2024). Manajemen Pengelolaan Sampah Model TPS3R Berbasis Pentahelix Untuk Mewujudkan Kota yang Berkelanjutan. *Geography: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan*, 12(1), 610–623. <https://doi.org/10.31764/geography.v12i1.22406>
- Dewi, S. P., Nurini, N., Dewi, D. I. K., & Wungo, G. L. (2022). Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat sebagai Upaya Mewujudkan Kota Layak Huni di Kelurahan Bulusan Tembalang Semarang. *Warta LPM*, 235–249. <https://doi.org/10.23917/warta.v25i2.648>
- Elly Kristiani Purwendah, & Daniel Joko Wahyono. (2022). Waste Bank As an Alternative To Community-Based Waste Management. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(2), 10–17. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.47084>
- Erlinnawati, A., & Purwanto, E. (2024). Peran Teknologi dan Komunikasi dalam Manajemen Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Bisnis Dan Komunikasi Digital*, 1(4), 11. <https://doi.org/10.47134/jbk.v1i4.3034>
- Fatmariyanti, Y., & Fauzi, A. (2023). Kebijakan Publik Versi William Dunn: Analisis dan Implementasi. *Humanities and Social Studies*, 1(1), 1–9.
- Fitrianto, A. R., Nawangsari, A. T., Agustin, R., & Arista, S. R. (2024). Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat: Revitalisasi Bank Sampah Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya untuk Masa Depan yang Lebih Hijau. *Riau Journal of Empowerment*, 7(1), 16–30. <https://doi.org/10.31258/raje.7.1.16-30>
- Hasibuan, N. S., Annisa, N., Wari, M., Siagian, W., Siregar, F. A. F., Husein, A., Pohan, I. S., Wirdana, W. B. A., Daulay, T. P. G., Siagian, H. P., Suryani, F., & Sari, M. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Melalui Bank Sampah Di Kota Baringin. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 4(1), 97–102. <https://doi.org/10.36985/x7n4wx88>
- Hertati, D., Nurhadi, & Tukiman. (2023). Effectiveness of Zero Based Waste Management Policy in Realizing a Clean Gresik Regency. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 11(1), 1–7. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v11i1.1738>
- Khaironi, D. R. (2023). Waste Management Design in Dusun Ngablak Rejo, Desa Gempolkurung, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. *Media Gizi Kemas*, 12(2), 870–877. <https://doi.org/10.20473/mgk.v12i2.2023.870-877>
- Laili, N. (2022). Penerapan Metode Reduce, Reuse Dan Recycle Pada Lingkup Keperawatan Komunitas Dalam Mengatasi Masalah Kesehatan Lingkungan Yang Berfokus Pada Sampah Rumah Tangga Di Probolinggo. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sisthana*, 4(2), 75–80. <https://doi.org/10.55606/pkmsisthana.v4i2.161>
- Lasaiba, M. A. (2024). Innovative Strategies for Urban Waste Management: Integration of Technology and Community Participation. *Geoforum*, 1–18. <https://doi.org/10.30598/geoforumvol3iss1pp1-18>
- Lukman, Ibrahim, A., Indar, N. I. N., & Abdullah, M. T. (2022). Evaluasi konteks kebijakan pengelolaan sampah di kabupaten sidenreng rappang. <https://jurnal.umsrappang.ac.id/Praja/Article/View/756>, 10, 177–181. <https://jurnal.umsrappang.ac.id/praja/article/view/756>
- Maulziandra, A. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Program Bank Sampah Serasi Wilayah Vila Dago Rw 21 Benda Baru Pamulang Tangerang Selatan. *Jurnal Community Online*, 2(2), 39–56. <https://doi.org/10.15408/jko.v2i2.28279>
- Muliawaty, L., & Hendryawan, S. (2020). *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi PERANAN E-GOVERNMENT DALAM PELAYANAN PUBLIK Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*. 11, 101–112. <https://doi.org/https://doi.org/10.23969/kebijakan.v11i2.2898>
- Nur, M. (2025). *Kebijakan Publik (Buku Ajar)* (M. Sari (ed.); Cetakan Pe). Get Press Indonesia.
- Okhtafianny, T., & Ariani, R. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Payakumbuh. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA)*, 3(2), 537–550. <https://doi.org/10.47709/jebma.v3i2.2837>
- Ramadan, A., Uceng, A., & Muhammad, N. (2025). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Penataan Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Rappang Kabupaten Sidenreng Rappang*. 17(1), 114–123.
- Rizqianti Hariz, A., & Sulaiman, S. (2022). Pengelolaan Sampah Kampus 2 Uin Walisongo Semarang (Tinjauan Multidimensi). *EnviroScientae*, 18(2), 76. <https://doi.org/10.20527/es.v18i2.14245>
- Roring, A. D., Mantiri, M. S., & Lopian, M. T. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) Di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Governance*, 1(2), 1–10. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/viewFile/36214/33721>

- Setianingtias, R., Baiquni, M., & Kurniawan, A. (2019). Pemodelan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Ekonomi Dan Pembangunan*, 27(02). <https://doi.org/https://doi.org/10.14203/JEP.27.2.2019.61-74>
- Siregar, N. (2022). Menentukan Model Implementasi Kebijakan Dalam Menganalisis Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA). *Ilmu Sosial*, 1(7), 713–722.
- Sumardjo, Firmansyah, A., Dharmawan, L., Kriswatriyono, A., & Wulandari, Y. P. (2022). Environmental Management System Toward Sustainable Development Goals Achievement Base on Community Empowerment in Peri-Urban. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 950(1), 12067. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/950/1/012067>
- Zakirman, Z., Nurdin, G., Marsinah, N., & Chandrawati, T. (2022). Pelatihan praktik pengolahan sampah dengan metode 3R di SDN 03 Putat Nutug Ciseeng Bogor. *ABSYARA: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 3(2), 236–242. <https://doi.org/10.29408/ab.v3i2.6514>
- Zukhriadi, R. R. E. T. Z., Komariyah, L., & Sandy, A. T. (2021). Evaluasi Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah di Desa Wisata Apung Kampung Malahing Kota Bontang. *Geoedusains: Jurnal Pendidikan Geografi*, 2(1), 53–60. <https://doi.org/10.30872/geoedusains.v2i1.529>